

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Pelatihan Pertanian Jambi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jl. Jambi - Palembang KM. 16

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan Pertanian Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jambi, 29 Januari 2020

Klase Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Lathon Helmy, MP

NIP. 195502151992031013

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

JL. JAMBI - PALEMBANG KM. 16 KOTAK POS 225 JAMBI - 36001

TELEPON (0741) 24088, FAXSIMILE (0741) 24088

WEBSITE : www.bppjambi.info

EMAIL : bapeltanjambi@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 23 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Zahron Helmy, MP

NIP. 196602151992031013

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp259.753.650,00 atau mencapai 112,86% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp230.150.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp16.493.620.952,00 atau mencapai 98,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp16.678.726.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.727.436.185,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp13.626.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp22.693.044.475,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp20.765.710,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp31.473.493,00 dan Rp22.695.962.692,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp234.703.100,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp17.614.880.341,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-17.380.177.241,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp24.881.550,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-17.355.295.691,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp24.369.200.666,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-17.355.295.691,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-551.809.585,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.233.867.302,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp22.695.962.692,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	230.150.000,00	259.753.650,00	112,86	235.896.836,00
Jumlah Pendapatan		230.150.000,00	259.753.650,00	112,86	235.896.836,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.412.776.000,00	5.276.742.152,00	97,49	5.023.946.722,00
Belanja Barang	B.4.	10.899.606.000,00	10.850.590.300,00	99,55	11.086.609.350,00
Belanja Modal	B.5.	366.344.000,00	366.288.500,00	99,98	1.522.323.000,00
Jumlah Belanja		16.678.726.000,00	16.493.620.952,00	98,89	17.632.879.072,00

II. NERACA

BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	0,00	9.221.650,00
Persediaan	C.1.2.	13.626.000,00	6.860.600,00
Jumlah Aset Lancar		13.626.000,00	16.082.250,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	7.223.128.500,00	7.223.128.500,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	14.736.626.038,00	14.493.337.538,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	11.227.312.000,00	11.437.035.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	614.895.000,00	883.483.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	2.437.517.158,00	2.437.517.158,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-13.546.434.221,00	-12.094.783.528,00
Jumlah Aset Tetap		22.693.044.475,00	24.379.717.668,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	0,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	158.122.000,00	194.357.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-137.356.290,00	-176.673.000,00
Jumlah Aset Lainnya		20.765.710,00	23.799.000,00
Jumlah Aset		22.727.436.185,00	24.419.598.918,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	31.473.493,00	50.398.252,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.473.493,00	50.398.252,00
Jumlah Kewajiban		31.473.493,00	50.398.252,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	22.695.962.692,00	24.369.200.666,00
Jumlah Ekuitas		22.695.962.692,00	24.369.200.666,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		22.727.436.185,00	24.419.598.918,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	234.703.100,00	230.588.200,00
JUMLAH PENDAPATAN		234.703.100,00	230.588.200,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.274.428.287,00	5.024.447.625,00
Beban Persediaan	D.3.	38.678.600,00	62.412.100,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.770.970.156,00	6.839.811.594,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	743.759.800,00	623.349.350,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	4.018.308.100,00	3.489.046.850,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	1.114.550.000,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	150.000.000,00	80.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1.504.185.398,00	2.089.225.614,00
JUMLAH BEBAN		17.614.880.341,00	18.208.293.133,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-17.380.177.241,00	-17.977.704.933,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	5.852.000,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	22.164.450,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	19.252.050,00	5.491.136,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	222.500,00	525.600,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		24.881.550,00	-17.198.914,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-17.355.295.691,00	-17.994.903.847,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	24.369.200.666,00	24.179.355.336,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-17.355.295.691,00	-17.994.903.847,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-551.809.585,00	787.766.941,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-601.311.000,00	787.766.949,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	49.501.415,00	-8,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	16.233.867.302,00	17.396.982.236,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	22.695.962.692,00	24.369.200.666,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Balai Pelatihan Pertanian Jambi pada awal didirikan dengan nama Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Lubuk Ruso Jambi pada tanggal 27 Mei 1981 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 368/Kpts/OT.140/V/1981, kemudian berubah menjadi Balai Diklat Pertanian (BDP) Lubuk Ruso Jambi.

Dikarenakan ada otonomi daerah pada tahun 2000 BDP Lubuk Ruso Jambi diserahkan ke Pemda Jambi sebagai UPTD dibawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dengan nama Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP) Jambi yang berkedudukan di Jalan Jambi – Palembang KM. 16 Jambi, dan sejak tanggal 8 Oktober 2004 berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 635/Kpts/OT/10/2004 statusnya berubah kembali menjadi UPT Pusat dibawah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP) dengan nama Balai Diklat Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Lahan Rawa (BDAPTLR) Jambi.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 21/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Februari 2007 Balai Diklat Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Lahan Rawa (BDAPTLR) Jambi berubah menjadi Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Melalui peran Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi diharapkan aparatur dan non aparatur dibidang pertanian dapat ditingkatkan kualitas sumberdaya manusianya sehingga menjadi aparatur dan non aparatur yang handal.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi berkomitmen dengan visi *“menjadi lembaga pelatihan pertanian yang andal dalam menghasilkan SDM Pertanian yang berkemauan dan berkemampuan tinggi dalam bekerja dan beragribisnis.”*

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi mempunyai misi:

- Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja;
- Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas agribisnis;
- Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan perkebunan dan teknologi lahan rawa dan melaksanakan pelatihan teknis fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK);

- Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan dalam memberikan pelayanan konsultasi agribisnis yang prima;
- Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan pelatihan kerjasama luar negeri;
- Melaksanakan system informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan Pertanian Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pelatihan Pertanian Jambi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	230.150.000,00	230.150.000,00
Jumlah Pendapatan	230.150.000,00	230.150.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.100.207.000,00	5.305.016.000,00
Belanja Lembur	0,00	107.760.000,00
Belanja Barang Operasional	1.101.585.000,00	1.113.135.000,00
Belanja Barang Non Operasional	3.381.654.000,00	2.875.551.000,00
Belanja Barang Persediaan	17.118.000,00	45.618.000,00
Belanja Jasa	1.131.320.000,00	830.700.000,00
Belanja Pemeliharaan	747.790.000,00	744.584.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.709.390.000,00	4.025.468.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.667.500.000,00	150.000.000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	9.471.400.000,00	1.114.550.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.400.000,00	243.300.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.624.000,00	123.044.000,00
Belanja Modal Lainnya	113.976.000,00	0,00
Jumlah Belanja	26.827.964.000,00	16.678.726.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp259.753.650,00 atau mencapai 112,86% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp230.150.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	19.198.550,00	0,00

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	230.150.000,00	240.555.100,00	104,52
Jumlah	230.150.000,00	259.753.650,00	112,86

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 10,11% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	19.198.550,00	4.702.000,00	308,31
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	240.555.100,00	230.588.200,00	4,32
Pendapatan Lain-lain	0,00	606.636,00	- 100,00
Jumlah	259.753.650,00	235.896.836,00	10,11

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp16.493.620.952,00 atau 98,89% dari anggaran belanja sebesar Rp16.678.726.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	5.412.776.000,00	5.277.487.894,00	97,50
Belanja Barang	10.899.606.000,00	10.850.590.300,00	99,55
Belanja Modal	366.344.000,00	366.288.500,00	99,98
Total Belanja Kotor	16.678.726.000,00	16.494.366.694,00	98,89
Pengembalian Belanja		-745.742,00	0,00
Total Belanja	16.678.726.000,00	16.493.620.952,00	98,89

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -6,46% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya anggaran belanja barang dan belanja modal ditahun 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	5.276.742.152,00	5.023.946.722,00	5,03
Belanja Barang	10.850.590.300,00	11.086.609.350,00	-2,13
Belanja Modal	366.288.500,00	1.522.323.000,00	-75,94
Total Belanja	16.493.620.952,00	17.632.879.072,00	-6,46

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.276.742.152,00 dan Rp5.023.946.722,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,03% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain penambahan 2 orang CPNS, adanya kenaikan pangkat pegawai dan jabatan fungsional.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.216.859.894,00	5.026.635.661,00	3,78
Belanja Lembur	60.628.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.277.487.894,00	5.026.635.661,00	4,99
Pengembalian Belanja Pegawai	-745.742,00	-2.688.939,00	-72,27
Jumlah Belanja	5.276.742.152,00	5.023.946.722,00	5,03

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.850.590.300,00 dan Rp11.086.609.350,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -2,13% dari TA 2018. Hal ini disebabkan penurunan anggaran belanja barang di tahun 2019.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.094.406.900,00	974.295.900,00	12,33
Belanja Barang Non Operasional	2.872.343.000,00	4.889.403.300,00	-41,25

Belanja Barang Persediaan	45.613.000,00	59.620.000,00	-23,49
Belanja Jasa	811.609.500,00	970.893.950,00	-16,41
Belanja Pemeliharaan	743.759.800,00	623.349.350,00	19,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.018.308.100,00	3.489.046.850,00	15,17
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Penda	150.000.000,00	80.000.000,00	87,50
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.114.550.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	10.850.590.300,00	11.086.609.350,00	-2,13
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	10.850.590.300,00	11.086.609.350,00	-2,13

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp366.288.500,00 dan Rp1.522.323.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -75,94% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan penurunan anggaran belanja modal di tahun 2019.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.288.500,00	23.828.000,00	921,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.000.000,00	1.498.495.000,00	-91,79
Jumlah Belanja Kotor	366.288.500,00	1.522.323.000,00	-75,94
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	366.288.500,00	1.522.323.000,00	-75,94

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp243.288.500,00 dan Rp23.828.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 921,02% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain adanya belanja modal sarana penunjang pelatihan vokasi dan sertifikasi bidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.288.500,00	23.828.000,00	921,02
Jumlah Belanja Kotor	243.288.500,00	23.828.000,00	921,02

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	243.288.500,00	23.828.000,00	921,02

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

1. Pengadaan kendaraan bermotor untuk mendukung pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bagi asisten kebun kelapa sawit (kendaraan roda 3) sebanyak 1 unit senilai Rp. 31.545.200,00;
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (laptop/notebook) sebanyak 3 unit senilai Rp. 37.298.000,00 dan gadget/kamera digital untuk drone 1 unit senilai Rp. 3.020.000,00;
3. Pengadaan sarana penunjang pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang perkebunan kelapa sawit senilai Rp. 56.475.000,00;
4. Pengadaan drone untuk pemetaan lahan dan pengamatan H/P sebanyak 1 unit senilai Rp. 22.181.550,00;
5. Pengadaan lemari penyimpanan sarana prasarana penunjang pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang perkebunan kelapa sawit 1 unit senilai Rp. 3.900.000,00;
6. Pengadaan sarana penunjang pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang perkebunan karet berupa mesin penyadap karet elektrik 1 unit senilai Rp. 7.440.000,00;
7. Pengadaan AC Split sebanyak 5 unit senilai Rp. 22.700.000,00;
8. Pengadaan pompa air sumur dalam (submersible pump) sebanyak 2 unit senilai Rp. 58.728.750,00;

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp123.000.000,00 dan Rp1.498.495.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -91,79% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan menurunnya anggaran belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2019.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.000.000,00	1.498.495.000,00	-91,79
Jumlah Belanja Kotor	123.000.000,00	1.498.495.000,00	-91,79
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	123.000.000,00	1.498.495.000,00	-91,79

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berasal dari pembangunan gudang penyimpanan sarana pelatihan vokasi bidang perkebunan senilai Rp. 123.000.000,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.221.650,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Jumlah	0,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.626.000,00 dan Rp6.860.600,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan nomor: 18/PL.030/I.19/01/2020 Tanggal 8 Januari 2020. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	13.626.000,00	3.550.600,00
Bahan Baku	0,00	3.310.000,00
Jumlah	13.626.000,00	6.860.600,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.223.128.500,00 dan Rp7.223.128.500,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada aset tanah di tahun 2019.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp14.736.626.038,00 dan Rp14.493.337.538,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	14.493.337.538,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	243.288.500,00
Saldo per 31 Desember 2019	14.736.626.038,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-12.805.989.127,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.930.636.911,00

Mutasi transaksi penambahan dari pembelian peralatan dan mesin adalah berupa:

- 1 unit kendaraan roda 3 senilai Rp. 31.545.200,-;
- 3 unit laptop/notebook senilai Rp. 37.298.000,-;
- 1 unit gadget/kamera digital untuk drone senilai Rp. 3.020.000,-;
- 1 unit drone untuk pemetaan lahan dan pengamatan H/P senilai Rp. 22.181.550,-;
- 12 unit peralatan penunjang pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang perkebunan kelapa sawit senilai Rp. 56.475.000,-;
- 1 unit lemari penyimpanan sarana prasarana penunjang pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang perkebunan kelapa sawit senilai Rp. 3.900.000,-;
- 1 unit mesin penyadap karet elektrik senilai Rp. 7.440.000,-;
- 5 unit AC split senilai Rp. 22.700.000;
- 2 unit pompa air sumur dalam (submersible pump) senilai Rp. 58.728.750.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.227.312.000,00 dan Rp11.437.035.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	11.437.035.000,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	123.000.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-332.723.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	11.227.312.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-403.857.103,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	10.823.454.897,00

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa 40 M² pembangunan gudang penyimpanan sarana pelatihan vokasi bidang perkebunan senilai Rp. 123.000.000,00.

Mutasi kurang dikarenakan adanya koreksi nilai input inventarisasi dan penilaian atas gedung dan bangunan senilai Rp. -332.723.000,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp614.895.000,00 dan Rp883.483.000,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	883.483.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-268.588.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	614.895.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-91.470.195,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	523.424.805,00

Mutasi transaksi pengurangan jalan, irigasi dan jaringan adalah berupa adanya koreksi nilai input inventarisasi dan penilaian senilai Rp. 614.895.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.437.517.158,00 dan Rp2.437.517.158,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada aset tetap lainnya di tahun 2019.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-13.546.434.221,00 dan Rp-12.094.783.528,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.736.626.038,00	-12.805.989.127,00	1.930.636.911,00
2.	Gedung dan Bangunan	11.227.312.000,00	-403.857.103,00	10.823.454.897,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	614.895.000,00	-91.470.195,00	523.424.805,00
4.	Aset Tetap Lainnya	2.437.517.158,00	-199.050.000,00	2.238.467.158,00
Akumulasi Penyusutan		29.016.350.196,00	-13.546.434.221,00	15.469.915.975,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan

aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.115.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-6.115.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0,00

Mutasi transaksi pengurangan aset tak berwujud adalah berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya (software) senilai Rp. 6.115.000,-.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	0,00
Jumlah	0,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp158.122.000,00 dan Rp194.357.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pelatihan Pertanian Jambi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	194.357.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.115.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-42.350.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	158.122.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-131.241.290,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	26.880.710,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi penambahan berasal dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya senilai Rp. 6.115.000,00 yang prosesnya telah mengajukan penghapusan ke eselon I BPPSDMP.
2. Mutasi pengurangan berasal dari penghapusan BMN yang dihentikan berupa kendaraan roda 3 sebanyak 2 unit senilai Rp.42.350.000,00 yang prosesnya telah dilakukan lelang dan menunggu SK penghapusan dari Menteri Pertanian RI.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Jambi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-137.356.290,00 dan Rp-176.673.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	158.122.000,00	-131.241.290,00	26.880.710,00
Akumulasi Penyusutan		158.122.000,00	-137.356.290,00	20.765.710,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp31.473.493,00 dan Rp50.398.252,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	561.193,00	2.875.058,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	30.912.300,00	38.301.544,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00	9.221.650,00
Jumlah	31.473.493,00	50.398.252,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.695.962.692,00 dan Rp24.369.200.666,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp234.703.100,00 dan Rp230.588.200,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	73.030.000,00	37.065.000,00	97,03
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	157.455.100,00	189.156.000,00	-16,76
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.218.000,00	4.367.200,00	-3,42
Jumlah	234.703.100,00	230.588.200,00	1,78

1. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI berasal dari sewa aula, sewa ruang kelas dan sewa mess/asrama dengan fasilitas AC dan Non AC serta sound system.
2. Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya berasal dari perolehan hasil pertanian seperti kelapa sawit, getah karet, pembibitan jamur tiram dan buah naga;
3. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari sewa rumah dinas dan sewa gedung KPN Agriwidya Yasa

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.274.428.287,00 dan Rp5.024.447.625,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.700.691.000,00	3.580.402.920,00	3,36
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.205,00	51.668,00	-0,90
Beban Tunj. Anak PNS	83.802.552,00	76.460.743,00	9,60

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Beras PNS	190.826.700,00	192.999.300,00	-1,13
Beban Tunj. Fungsional PNS	198.940.000,00	203.110.000,00	-2,05
Beban Tunj. PPh PNS	9.999.480,00	5.682.386,00	75,97
Beban Tunj. Struktural PNS	37.800.000,00	35.000.000,00	8,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	260.489.390,00	258.661.608,00	0,71
Beban Tunjangan Umum PNS	143.864.960,00	137.215.000,00	4,85
Beban Uang Lembur	60.628.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	587.335.000,00	534.864.000,00	9,81
Jumlah	5.274.428.287,00	5.024.447.625,00	4,98

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp38.678.600,00 dan Rp62.412.100,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	3.310.000,00	6.295.000,00	-47,42
Beban Persediaan konsumsi	35.368.600,00	56.117.100,00	-36,97
Jumlah	38.678.600,00	62.412.100,00	-38,03

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.770.970.156,00 dan Rp6.839.811.594,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
--------	----------------------------	----------------------------	----------------

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	2.407.642.000,00	4.233.855.300,00	-43,13
Beban Barang Non Operasional Lainnya	211.961.000,00	314.098.000,00	-32,52
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	102.840.000,00	104.160.000,00	-1,27
Beban Honor Output Kegiatan	252.740.000,00	341.450.000,00	-25,98
Beban Jasa Lainnya	18.816.000,00	41.000.000,00	-54,11
Beban Jasa Profesi	443.692.000,00	460.800.000,00	-3,71
Beban Keperluan Perkantoran	985.250.500,00	864.699.400,00	13,94
Beban Langganan Listrik	291.460.026,00	312.418.274,00	-6,71
Beban Langganan Telepon	2.707.430,00	4.394.120,00	-38,39
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.661.200,00	5.436.500,00	4,13
Beban Sewa	48.200.000,00	157.500.000,00	-69,40
Jumlah	4.770.970.156,00	6.839.811.594,00	-30,25

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp743.759.800,00 dan Rp623.349.350,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256.350.000,00	97.500.000,00	162,92
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	487.409.800,00	525.849.350,00	-7,31
Jumlah	743.759.800,00	623.349.350,00	19,32

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.018.308.100,00 dan Rp3.489.046.850,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.793.789.300,00	2.099.671.450,00	-14,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.187.848.800,00	327.598.500,00	262,59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.036.670.000,00	1.061.776.900,00	-2,36
Jumlah	4.018.308.100,00	3.489.046.850,00	15,17

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.264.550.000,00 dan Rp80.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	400.800.000,00	0,00	0,00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	80.000.000,00	-100,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	150.000.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	713.750.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.264.550.000,00	80.000.000,00	1.480,69

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.504.185.398,00 dan Rp2.089.225.614,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	764.375,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Software	764.375,00	1.528.750,00	-50,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	262.281.643,00	237.732.143,00	10,33
Beban Penyusutan Irigasi	2.355.864,00	3.040.187,00	-22,51
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	28.356.000,00	140.458.428,00	-79,81
Beban Penyusutan Jaringan	10.568.384,00	10.568.384,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.504.540,00	752.270,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.197.590.217,00	1.695.145.452,00	-29,35
Jumlah	1.504.185.398,00	2.089.225.614,00	-28,00

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-22.164.450,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-222.500,00	-525.600,00	-57,67
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	19.198.550,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	4.702.000,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	53.500,00	182.500,00	-70,68
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.852.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	606.636,00	-100,00
Jumlah	24.881.550,00	-17.198.914,00	-244,67

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.369.200.666,00 dan Rp24.179.355.336,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-17.355.295.691,00 dan Rp-17.994.903.847,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-551.809.585,00 dan Rp787.766.941,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-601.311.000,00 dan Rp787.766.949,00. Rincian selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	-332.723.000,00
Jalan dan Jembatan	-285.970.000,00
Irigasi	17.382.000,00
Jumlah	-601.311.000,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-8,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.233.867.302,00 dan Rp17.396.982.236,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.493.620.952,00
Diterima dari Entitas Lain	-259.753.650,00
Jumlah	16.233.867.302,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-259.753.650,00 sedangkan DKEL sebesar Rp16.493.620.952,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp23.148.769.452,00 dan Rp24.369.200.666,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 384/Kpts/KU.010/05/2018 Tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan Pertanian Jambi nomor 07/Kpts/KU.010/I.19/01/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2019;

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sabir, S.Pt, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Budi Rijaya
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ngasiran, S.Pt
Bendahara Pengeluaran	: Sucipto, SP
Bendahara Penerima	: Eza Aurora Adriamita, SP

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 596/KPTS/KP.230/A/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkup BPPSDMP, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi Dr. Ir. Zahron Helmy, MP yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi setelah Bapak Sabir S.Pt, M.Si dilantik menjadi Kepala Balai Besar Batang Kaluku pada tanggal 21 Juni 2019.

Pada tahun anggaran 2019, Balai Pelatihan Pertanian Jambi mengalami 8 (delapan) kali revisi DIPA.

Revisi 1 (pertama) pada tanggal 12 Februari 2019 dikarenakan adanya pengurangan anggaran sebesar Rp 158.308.000,00 yang semula anggaran di DIPA Rp 26.827.964.000,00 menjadi Rp 26.669.656.000,00;

Revisi 2 (dua) pada tanggal 19 Maret 2019 dikarenakan adanya refocusing anggaran sebesar Rp 10.303.499.000,00 yang semula anggaran di DIPA setelah revisi pertama Rp 26.669.656.000,00 menjadi Rp 16.366.157.000,00;

Revisi 3 (tiga) pada tanggal 26 Juni 2019 dikarenakan adanya pengurangan anggaran pada output pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian sebesar Rp 137.570,000,00; penambahan anggaran pada output layanan dukungan manajemen pelatihan sebesar Rp 110.620.000,00 dan penambahan anggaran pada output layanan sarana dan prasarana internal sebesar Rp 26.950.000,00 dan perubahan rencana penarikan halaman III DIPA, sehingga anggaran pada revisi ke tiga menjadi Rp 16.366.157.000,00.

Revisi 4 (empat) pada tanggal 30 Agustus 2019 dikarenakan adanya penambahan anggaran pada output layanan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 312.569.000,00 dan perubahan rencana penarikan halaman III DIPA, sehingga anggaran pada revisi keempat menjadi Rp. 16.678.726,00.

Revisi 5 (kelima) pada tanggal 26 September 2019 dikarenakan adanya revisi administrasi berupa perubahan data kuasa pengguna anggaran, perubahan rencana penarikan halaman III DIPA, perubahan/pergeseran pada output pelatihan mendukung

komoditas strategis pertanian sebesar Rp. 154.111.000,00 dalam rangka peningkatan kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi, sehingga anggaran pada revisi kelima tetap senilai Rp. 16.678.726,00.

Revisi 6 (enam) pada tanggal 01 November 2019 dikarenakan pergeseran anggaran antar output berupa pergeseran anggaran pada output pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian sebesar Rp. Rp. 133.705.000,00 dalam rangka peningkatan kinerja BPP Jambi. Pergeseran anggaran pada output sertifikasi profesi bidang pertanian sebesar Rp. 35.970.000,00 dalam rangka peningkatan kinerja BPP Jambi. Penambahan anggaran pada output layangan dukungan manajemen pelatihan sebesar Rp. 169.675.000,00 dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia pertanian. Serta adanya perubahan rencana penarikan halaman III DIPA. Sehingga anggaran pada revisi ke enam tetap senilai Rp. 16.678.726,00.

Revisi 7 (tujuh) pada tanggal 18 November 2019 dikarenakan adanya pemutakhiran data POK.

Revisi 8 (delapan) pada tanggal 12 Desember 2019 dikarenakan adanya pemutakhiran data POK.